



Anggota Dewan Ikut Nikmati Kredit Transvision

**Kejati DIJ Dalami
Keterlibatan Banyak Pihak**

JOGJA, Radar Jogja - Kejaksaan Tinggi DIJ terus mengadakan pendalaman terhadap penyidikan per-

kara dugaan korupsi kredit karyawan fiktif di Bank Jogja senilai Rp 27,4 miliar. Pendalaman itu dengan mengusut keterlibatan pihak-pihak lain di luar nama kedua tersangka Klau Victor Apriyanto dan Farel. "Semua kami dalami," ujar Pelak-

sana Tugas Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Mohammad Fatin SH di kantornya kemarin (31/3). Pendalaman itu sangat mungkin dilakukan terhadap semua pihak yang ditengarai mengetahui perkara tersebut. ▶ **Baca Anggota...** Hal 15

Sambungan dari hal 1

Termasuk mengembangkan penyidikan pada perkara kredit karyawan Transvision di enam bank lainnya yang kesandung kasus mirip Bank Jogja. "Prinsipnya semua akan kami dalami," tegasnya.

Seorang sumber di lingkungan kejaksaan menginformasikan, tim penyelidik kejati tengah membidik pemberian kredit di salah satu bank BUMN. Lokasinya berada di Jalan Sudirman, Jogja.

Berbeda dengan lima bank lainnya, kredit yang diberikan bukan berupa pinjaman uang.

Namun berwujud kredit barang. "Pihak yang diduga terlibat masih Klau Victor, Farel dan kawan-kawan. Masih satu jaringan," ujar sumber itu.

Di pihak lain, fasilitas kredit karyawan Transvision itu ternyata juga dinikmati seorang wakil rakyat di Kota Magelang.

Nama anggota dewan itu adalah Saleh Nahdi. Semasa menjadi karyawan Transvision, dia ikut memanfaatkan kredit yang diajukan ke Bank BPD DIY. Ada 48 orang karyawan yang menerima kucuran kredit. Total pinjaman yang diberikan sebesar Rp 17 miliar.

"Kredit diajukan sejak 2017 lalu," ujar Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad di kantornya, kemarin.

Santoso membantah informasi yang menyebutkan kredit yang dikucurkan ke karyawan Transvision mencapai Rp 48 miliar. Menurut dia, angka 48 adalah jumlah karyawan penerima kredit. "Bukan nilai kreditnya," bantahnya.

Dari angka Rp 17 miliar itu, sebagian besar telah tertagih. Hingga akhir 2020 kredit yang belum terbayarkan tinggal kurang dari Rp 1 miliar. "Dalam perhitungannya kami jumlah relatif sedikit sehingga tidak begitu berpengaruh," tegasnya.

Pria asal Sedayu, Bantul, ini lantas bercerita ihwal Bank BPD DIY memberikan kredit karyawan bagi Transvision. Kredit diberikan melalui Cabang Bank BPD Sleman. Semula tidak ada persoalan. Sebab, nilai kredit setiap karyawan masih tergolong wajar. Rata-rata nilainya sekitar Rp 50 juta. Setelah diverifikasi status karyawan juga jelas. Karyawan tetap dan kontrak. "Angsuran juga dibayarkan secara tertib dan lancar," ceritanya.

Namun belakangan muncul kecurigaan dari satuan pengawas internal (SPI) Bank BPD DIY. Kecurigaan itu terkait dengan nilai kredit yang diajukan. Ada lonjakan besar. SPI menindaklanjuti dengan serangkaian penelitian. Hasilnya diketahui ada sejumlah objek yang tidak sesuai. "Kami mengendus ada kecurangan dari pihak eksternal," bebarnya.

Kecurangan itu antara lain terjadi pemalsuan identitas. Pihak yang menerima kredit ternyata bukan karyawan Transvision. Jumlah memang tidak begitu banyak. Di bawah 10 orang di antara 48 karyawan penerima kredit.

Tahu adanya kecurangan itu, Santoso bergerak cepat. Kredit yang semula ditangani Bank BPD DIY Cabang Sleman ditarik ke Bank BPD DIY pusat. Kredit diputuskan dihentikan.

Bank BPD DIY juga telah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIJ. Selain itu, pihaknya mencadangkan sejumlah dana. Kredit karyawan Transvision ditetapkan sebagai kredit macet sejak akhir Desember 2020 lalu.

Santoso tidak tinggal diam. Lantaran merasa menjadi korban penipuan, penggelapan dan pemalsuan, dia kemudian memerintahkan Pimpinan BPD DIY Cabang Sleman Efendi Sutopo Yuwono melaporkan perkara tindak pidana tersebut ke Polda DIJ. Laporan disampaikan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Reskrim) Polda DIJ pada Januari 2021.

Ditanya soal penanggung jawab kredit dari Transvision, Santoso menyebutkan nama Klau Victor. Jabatannya pimpinan cabang Transvision Jogja. Dia didampingi Farel yang bertugas sebagai bendahara. Sedangkan Saleh Nahdi atau SN bukanlah pimpinan cabang Transvision Magelang seperti diberitakan koran ini sebelumnya.

SN menjadi bagian dari penerima kredit. Statusnya kala itu karyawan Transvision Jogja. Nilai kredit yang dinikmati Rp 500 juta. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah dicicil. Nilai angsuran anggota DPRD Kota Magelang itu tinggal Rp 86 juta.

"Kalau nilai itu tidak tertagih, kami serahkan ke asuransi," jelas direktur utama Bank BPD DIY ini.

Sejak kasus ini mencuat, tidak gampang menemui SN. Tim SPI Bank BPD DIY berhasil berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Itu pun tidak dilakukan di gedung dewan. "Tim kami ditemui di sebuah terminal," tuturnya pria yang hobi touring dan kuliner ini.

SN ditengarai ikut memanfaatkan kredit di antara 10 nama karyawan Transvision yang ditengarai fiktif. Untuk memecahkan kondisi tersebut, Bank BPD DIY pernah mengundang Klau Victor dan Farel ke kantor pusat di Jalan Tentara Rakyat Pelajar Jogja. Keduanya dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

Sedangkan terhadap beberapa debitur yang diketahui memakai identitas palsu diadakan pendekatan. Mereka diminta tetap memenuhi kewajibannya. "Karena kasus ini merupakan tindak pidana, kami tempuh langkah hukum," tegasnya.

Penasihat Hukum Bank BPD DIY Ramdlon Naning menginformasikan setelah berjalan tiga bulan laporan kliennya mengalami perkembangan signifikan. Dari proses penyelidikan, naik ke tahap penyidikan. "Setahu saya sudah masuk tahap penyidikan," jelas advokat senior yang berlatar belakang wartawan ini. (kus/pra/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005